

## ANALISIS FRAMING BERITA DI MEDIA LEMBAGA PEMERINTAH TERKAIT SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### FRAMING ANALYSIS OF NEWS IN GOVERNMENT INSTITUTIONAL MEDIA REGARDING ELECTRONIC GOVERNMENT SYSTEM

Gusmia Arianti<sup>1</sup>, Edoardo Irfan<sup>2</sup>, Nanang Haroni<sup>3</sup>, Muhammad Shaddam Rizqullah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Al-Azhar Indonesia

Jalan Sisingamangaraja Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup>gusmia.arianti@uai.ac.id; <sup>2</sup>edoardo\_irfan@uai.ac.id; <sup>3</sup>nanangharoni@uai.ac.id

Diterima tgl. 16 Mei 2025 Direvisi tgl. 30 Mei 2025 Disetujui tgl. 10 Juni 2025

#### ABSTRACT

*Government media plays a crucial role in facilitating effective communication and organizational cohesion in the public sector, shifting from traditional methods to digital platforms to improve employee engagement, transparency, and accountability. This evolution supports efficient governance and builds public trust, both internally and externally. Government digital platforms such as microblogs and social media are now modern means to communicate policies, engage the public, and offer services, dynamically influencing public evaluation and government image. However, government media faces unique challenges, such as different work incentives and a potential drop in journalistic standards compared to mainstream media, which can affect credibility. Its effectiveness depends on providing specific, authentic information and being responsive to misinformation, as well as using professional expertise. This study analyzes the framing of news related to the Electronic Government System (EBS) policy in the ministry's internal media. SPBE, which aims to improve accountability and quality of public services through ICT, has shown significant progress in Indonesia, although challenges such as limited infrastructure and suboptimal e-participation still exist. Using Robert Entman's framing analysis, this study aims to understand how the SPBE issue is packaged in the government's internal media to achieve optimal impact.*

**Keywords:** Entman's Framing Analysis, E-government, Government media, Public Service

#### ABSTRAK

Media pemerintah berperan krusial dalam memfasilitasi komunikasi efektif dan kohesi organisasi di sektor publik, bergeser dari metode tradisional ke platform digital untuk meningkatkan keterlibatan pegawai, transparansi, dan akuntabilitas. Evolusi ini mendukung tata kelola yang efisien dan membangun kepercayaan publik, baik secara internal maupun eksternal. Platform digital pemerintah seperti microblog dan media sosial kini menjadi sarana modern untuk menyampaikan kebijakan, melibatkan publik, dan menawarkan layanan, yang secara dinamis memengaruhi evaluasi publik dan citra pemerintah. Namun, media pemerintah menghadapi tantangan unik, seperti insentif kerja yang berbeda dan potensi penurunan standar jurnalistik dibandingkan media umum, yang dapat memengaruhi kredibilitas. Efektivitasnya bergantung pada penyediaan informasi yang spesifik, otentik, dan responsif terhadap misinformasi, serta penggunaan keahlian profesional. Penelitian ini menganalisis pembedaan berita terkait kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di media internal kementerian. SPBE yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik melalui TIK, telah menunjukkan kemajuan signifikan di Indonesia, meskipun tantangan seperti infrastruktur terbatas dan partisipasi elektronik yang suboptimal masih ada. Dengan menggunakan analisis framing Robert Entman, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana isu SPBE dikemas dalam media internal pemerintah untuk mencapai dampak yang optimal.

**Kata Kunci:** Analisis Framing Entman, E-government, Media Pemerintah, Pelayanan Publik

## 1. PENDAHULUAN

Media internal dalam pemerintahan memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi efektif organisasi sektor publik untuk memastikan bahwa informasi mengalir dengan lancar antara berbagai departemen dan tingkat pemerintahan. Pendekatan media internal telah bergeser dari metode komunikasi tradisional ke *platform* digital yang lebih canggih, sebagai respon terhadap

perubahan perilaku konsumsi media masyarakat. Perkembangan ini membuka peluang bagi peningkatan keterlibatan pegawai pemerintah, sekaligus mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan lembaga publik. Dalam perannya, media internal tidak hanya berkontribusi pada tata kelola yang lebih efisien tetapi juga mendukung upaya menjaga kepercayaan publik, dengan memastikan bahwa proses kerja pemerintah dapat dipahami baik secara internal maupun oleh publik.

Media internal pemerintah secara luas dapat didefinisikan sebagai ragam *platform* dan praktik yang digunakan oleh pemerintah nasional untuk berkomunikasi secara efektif di dalam organisasi mereka dan dengan publik eksternal. Struktur komunikasi ini biasanya dilakukan oleh struktur otoritas eksekutif pusat, termasuk kabinet, kantor perdana menteri, dan kementerian lini, dengan fokus pada pemangku kepentingan internal dan eksternal (Johansson & Raunio, 2020). Platform media baru pemerintah, seperti *microblog*, aplikasi, dan saluran media sosial, menyediakan sarana modern bagi lembaga pemerintah untuk menyampaikan pekerjaan mereka, melibatkan publik, dan menawarkan layanan, yang mencerminkan interaksi dinamis yang memengaruhi evaluasi publik dan pembangunan citra pemerintah (Luo & Hu, 2021). Selain itu, dalam kegiatannya, humas pemerintah umumnya mengemangkan tujuan menjalin hubungan yang harmonis dengan audiens internal dan eksternal untuk membangun kepercayaan dan pemahaman (Farhan & Sunuantari, 2023). Melalui pendekatan komunikasi yang beragam, kebijakan, tujuan, dan proyek pembangunan pemerintah dikomunikasikan secara efektif di berbagai platform dan kepada audiens yang beragam (Muhammad Amal Atta & Muhammad Maaz Shakeel, 2023).

Media-media yang dikelola pemerintah misalnya melalui Lembaga-lembaga kementerian, memiliki beberapa fungsi utama yaitu untuk operasi yang efektif dan membentuk persepsi publik terhadap lembaga pemerintah. Pertama, ini melampaui peran tradisional untuk mencakup kegiatan seperti pemantauan opini publik *online* yang meningkatkan ruang lingkup dan efektivitas komunikasi pemerintah. Selain itu, media internal pemerintah memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, sehingga mempengaruhi pasar politik dan pembuatan kebijakan publik. Media komunikasi ini mencerminkan insentif untuk melayani kelompok masyarakat yang berbeda dan secara signifikan membentuk hasil kebijakan.

Media internal pemerintah juga penting dalam melawan informasi yang salah dan mempertahankan kepemimpinan ideologis. Meskipun pesan pemerintah langsung dan monoton bisa menjadi tidak efektif, konten yang diperkaya dan didorong oleh emosi membantu membangun citra publik yang positif. Pendekatan strategis ini membantu dalam memenangkan dukungan publik dan menunjukkan kompetensi pemerintah dalam mengelola tatanan sosial dan politik. Selain itu, kegiatan hubungan masyarakat pemerintah sangat penting untuk membina hubungan yang harmonis dengan audiens, mendukung komunikasi yang transparan dan efektif. Media bertindak sebagai mediator antara rakyat dan pemerintah, memastikan bahwa tuntutan masyarakat dikomunikasikan, dan akuntabilitas pemerintah dipertahankan. Ini juga secara efektif berkoordinasi dengan jurnalis dan *outlet* media untuk mengkomunikasikan tujuan, kebijakan, dan proyek pemerintah, mempromosikan pemahaman publik. Koordinasi ini memfasilitasi aliran informasi yang stabil tentang inisiatif pemerintah, meningkatkan hubungan masyarakat dan dukungan.

Sistem media pemerintah dapat dipahami melalui beberapa model mapan yang mencerminkan tradisi politik dan kerangka kelembagaan yang berbeda. Secara historis, model klasik yang dikembangkan oleh Siebert, Peterson dan Schramm selama Perang Dingin membagi media dunia menjadi empat kategori berbeda: libertarian, tanggung jawab sosial, otoriter, dan Soviet. Model libertarian mendukung kebebasan berekspresi pendapat; model tanggung jawab sosial menekankan cakupan inklusif dari semua segmen masyarakat; model otoriter memposisikan media sebagai tunduk pada negara; dan model Soviet mengharuskan media untuk menjunjung tinggi ideologi Marxis-

Leninis (Sergey & Logunova, 2016). Memahami sistem media membutuhkan perhatian pada konteks nasional di mana mereka beroperasi. Model penjaga gerbang menunjukkan bahwa media, jurnalis, dan editor bertindak sebagai penjaga gerbang informasi, menentukan pesan mana yang sampai ke publik. Ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam konteks nasional tertentu daripada menerapkan standar universal “kebebasan” media.

Pemerintah biasanya berusaha untuk memperkuat bingkai pilihan mereka dalam liputan media untuk mendapatkan perhatian dan dukungan publik. Proses ini melibatkan upaya terorganisir karena organisasi media tidak dapat hanya diinstrumentalisasi. Media mempertahankan kekuasaan melalui *gatekeeping* (memilih berita mana yang akan diliput) dan membingkai konten, yang menjadikan mereka aktor otonom dalam proses politik. Oleh karena itu, hubungan antara media dan pemerintah dapat dilihat sebagai perebutan kekuasaan untuk mempengaruhi agenda, membentuk narasi, dan pada akhirnya mempengaruhi opini publik (Yüksel, 2013). Tentu saja sistem media yang dikelola lembaga pemerintah menghadapi berbagai tantangan yang dapat berdampak signifikan pada efektivitas dan kredibilitasnya. Tantangan ini terutama berkaitan dengan insentif para pekerjanya yang memang berbeda dengan Lembaga jurnalisme pada umumnya. Media pemerintah dikelola oleh tenaga-tenaga pemerintah yang tidak secara khusus mendapatkan keuntungan dari media itu sendiri. Sehingga seringkali, hal ini berpengaruh terhadap standar jurnalistik di media tersebut, dan tidak jarang juga menggambarkan pemahaman yang tidak memadai tentang isu-isu yang kompleks (Singh, 2020).

Tantangan-tantangan ini mengisyaratkan pentingnya media pemerintah berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif untuk pemerintahan sekaligus mempertahankan kredibilitas yang cukup untuk mendapatkan kepercayaan publik. Karena media berfungsi sebagai mediator penting antara warga negara dan sistem politik, termasuk cabang pemerintah dan lembaga politik, ekonomi, sosial, dan budaya lainnya. Sifat mediasi ini bervariasi sesuai dengan sistem politik dan tingkat kebebasan dalam masyarakat sipil. Secara umum, media memainkan peran utama dalam mengkomunikasikan kebutuhan masyarakat dan menekan pemerintah untuk bertanggung jawab. Tanpa media yang efektif, pemerintah mungkin lebih mudah menghindari memenuhi kebutuhan masyarakat, yang berpotensi mengarahkan warga untuk mengekspresikan tuntutan melalui cara yang lebih agresif. Selain itu, media memengaruhi sikap dan keyakinan publik, berpotensi menyatukan warga negara dalam penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah sambil secara langsung memengaruhi tata kelola melalui ekspresi tuntutan sosial dan pemantauan tindakan pemerintah (Matani & Hassanpour, 2014).

Munculnya teknologi digital, khususnya platform media baru pemerintah seperti microblog, WeChat, dan aplikasi informasi pemerintah, secara mendasar telah mengubah cara lembaga pemerintah berkomunikasi secara internal dan eksternal. Platform ini memungkinkan badan pemerintah untuk melakukan pekerjaan mereka, menyediakan produk dan layanan publik, dan berkomunikasi dengan warga secara online. Interaksi dinamis antara pemerintah dan publik melalui kanal digital ini secara langsung mempengaruhi bagaimana warga mengevaluasi kinerja pemerintah dan berkontribusi pada pembangunan citra pemerintah (Luo & Hu, 2021). Platform media baru menawarkan kebebasan berekspresi yang lebih besar dibandingkan dengan media tradisional, bertindak sebagai "pedang bermata dua" dalam konteks demokrasi. Saluran digital ini memiliki banyak fungsi: mereka meningkatkan kampanye politik, menyediakan platform kepada warga negara untuk mengekspresikan pandangan politik dan berkomunikasi langsung dengan pemerintah, berfungsi sebagai alat propaganda dan mobilisasi untuk gerakan politik, dan berpotensi menjadi instrumen untuk campur tangan eksternal dalam urusan dalam negeri (Wan, 2022).

Salah satu masalah yang penting untuk disampaikan melalui media pemerintah adalah kebijakan terkait *E-Government*. Sosialisasi kebijakan ini melalui media pemerintah merupakan tantangan

tersendiri mengingat kompleksnya masalah tersebut bagi kebanyakan warga. *E-Government* di Indonesia pada dasarnya adalah tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan cara layanan dan informasi pemerintah diberikan kepada publik baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini melibatkan peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan publik, sekaligus mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas pemberian layanan (Danu et al., 2023). Perjalanan dimulai pada tahun 2001, dengan diterbitkannya Inpres Nomor 6 yang difokuskan pada pengembangan telematika. Ini meletakkan dasar untuk inisiatif yang bertujuan untuk mereformasi aparatur negara melalui *e-government*. Istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggambarkan kerangka kerja Indonesia untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini mencakup peningkatan tata kelola yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel bersama dengan penyediaan e-layanan publik yang andal. SPBE telah berkembang melalui berbagai tahap, mulai dari penyebaran informasi, beralih ke layanan interaktif, dan kini maju menuju layanan transaksional, yang menunjukkan kematangan strategi *e-government* berkelanjutan (Aryanti et al., 2021; Danu et al., 2023; Sobari et al., 2023).

Penerapan *e-government* di Indonesia dipandu oleh kerangka hukum yang kuat yang terdiri dari beberapa peraturan penting. Perjalanan diawali dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001, yang meletakkan dasar bagi pengembangan dan pemanfaatan telematika dalam operasional pemerintah. Hal ini lebih lanjut didukung oleh Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006, yang membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional untuk mempercepat implementasi *e-government*. Pada tahun 2018, Perpres Nomor 95 memperkenalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebuah peraturan yang mewajibkan semua lembaga pemerintah untuk mengadopsi sistem pemerintahan elektronik, yang bertujuan untuk pemerintahan yang terintegrasi dan kohesif. Peraturan ini mencakup rencana induk komprehensif yang berfokus pada domain seperti perencanaan anggaran, pengelolaan data, protokol keamanan, dan infrastruktur *e-government* (Sobari et al., 2023; Ummah et al., 2022; Wadipalapa et al., 2024).

Tulang punggung implementasi e-Government Indonesia adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang berfungsi sebagai kerangka komprehensif untuk tata kelola berbasis elektronik di seluruh negeri. SPBE menggunakan indeks jatuh tempo untuk mengukur kemajuan implementasi *e-government* di semua tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Sistem ini berkembang dari konsep *e-government* sebelumnya, memperluas cakupannya untuk memberikan layanan yang ditingkatkan kepada warga, bisnis, dan entitas pemerintah lainnya (Arief et al., 2021; Aryanti et al., 2021). Beberapa implementasi utama di bawah kerangka kerja SPBE meliputi e-KTP (Kartu Identitas Elektronik): Program nasional yang menyediakan dokumen identifikasi aman bagi warga negara yang berisi fitur keamanan lanjutan berdasarkan basis data kependudukan nasional (Daud et al., 2022) *e-Office* yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah seperti DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021, sistem ini memudahkan layanan *Government-to-Government* (G2G) untuk pengelolaan administrasi resmi (Wahyudin, 2023), dan Layanan Pemerintah Terpadu, di mana SPBE menggabungkan berbagai domain termasuk perencanaan anggaran, proses bisnis, manajemen data, infrastruktur *e-government*, aplikasi, protokol keamanan, dan penyediaan layanan (Wadipalapa et al., 2024).

Perjalanan *e-government* Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang terukur dalam beberapa tahun terakhir, dengan investasi yang signifikan mendukung perkembangan ini. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghabiskan US\$6,78 miliar untuk pengembangan *e-government* dari tahun 2014 hingga 2019. Investasi ini membuahkan hasil positif, terbukti dengan kenaikan Indeks Pembangunan E-Government (EGDI) Perserikatan Bangsa-Bangsa, membaik dari posisi ke-107 pada tahun 2018 menjadi posisi ke-88 pada tahun 2020 di antara 193 negara anggota PBB (Rindani & Puspitodjati, 2020; Sabani, 2018; Ummah et al., 2022; Wahyudin, 2023).

Tapi tantangannya juga tak kalah serius. Peringkat EGDI negara ini tetap relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Di Asia Tenggara khususnya, Indonesia menempati peringkat ke-7 dalam penilaian EGDI 2020. Hambatan utama termasuk infrastruktur yang terbatas, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan lingkungan yang tidak mendukung termasuk masalah tata kelola dan manajemen TI. Selain itu, penelitian menunjukkan tantangan terus-menerus dalam partisipasi elektronik meskipun ada perbaikan infrastruktur. Indeks Partisipasi Elektronik (EPI) telah menunjukkan penurunan, menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan *online*, keterlibatan warga tetap tidak optimal (Hanafi et al., 2023; Nurhidayat et al., 2024). Jadi, penerapan SPBE telah berdampak signifikan pada pemberian pelayanan publik dengan berfungsi sebagai saluran pengaduan dan forum informasi bagi warga, meskipun penelitian menunjukkan bahwa konsolidasi dan peningkatan kualitas layanan masih diperlukan, terutama terkait kepercayaan dan dukungan publik (Susanto et al., 2024)

Di sisi lain, media di Indonesia telah memainkan peran penting dalam mbingkai layanan pemerintah berbasis elektronik (e-government) selama lima tahun terakhir. Pemberitaan media tentang e-government di Indonesia cenderung mengalami pergeseran fokus dari aspek teknis implementasi menuju dampak sosial dan aksesibilitas layanan. Pada umumnya, riset mengenai pemberitaan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan SPBE, dilakukan terhadap media-media mainstream di luar media yang dikelola Lembaga pemerintah. Penelitian ini, akan melakukan analisis framing terhadap pemberitaan mengenai kebijakan SPBE di media lembaga kementerian. Tujuannya antara lain untuk melihat sejauh mana isu ini dikemas secara jelas dan memungkinkan dampak lebih optimal.

Analisis framing media merupakan metode penelitian komunikasi yang berfokus pada bagaimana media mengonstruksi realitas melalui pemilihan, penekanan, dan pengabaian aspek-aspek tertentu dalam pemberitaan. Konsep framing pertama kali diperkenalkan oleh Erving Goffman pada tahun 1974 dan kemudian dikembangkan oleh berbagai peneliti seperti Robert Entman, Gamson dan Modigliani, serta Pan dan Kosicki. Framing dapat dipahami sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas untuk mempengaruhi bagaimana audiens memaknai suatu isu (Pan & Kosicki, 1993). Teknik framing mbingkai suatu peristiwa untuk memahami perspektif atau sudut pandang digunakan oleh media saat menganalisis dan membuat berita tentang masalah tersebut. Sehingga dalam framing diperlukan penonjolan pada aspek tertentu, ini digunakan untuk mengetahui pbingkaiian suatu realitas dapat ditafsirkan dan direkonstruksi dengan metode khusus. Oleh karena itu bagian tertentu akan mempunyai makna lebih dibandingkan lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mempengaruhi cara berpikir khalayak dalam memaknai suatu peristiwa yang terjadi (Kartini, K., Hasibuan, R. M. B., Sinaga, N. S., & Rahmadina, 2022).

Melalui framing, khalayak akan melihat realitas kehidupan yang digambarkan melalui sebuah rangkaian teks yang membentuk suatu cerita, sehingga teks tersebut mempunyai makna. Analisis Framing Robert Entman mempunyai 4 pisau analisis untuk memecahkan masalah antara lain pendefinisian masalah, interpretasi / mbingkai penyebab masalah, membuat keputusan moral, dan menekankan penyelesaian. Model framing ini melihat pemilihan tempat, pengulangan grafis, label, asosiasi simbol dan budaya, generalisasi, simplikasi, dan lain-lain. Kemudian Entman memberikan rumusan tentang model framing antara lain (Entman, 2007): 1). *Define problems*, elemen utama dan merupakan kerangka utama yang paling penting. Dalam konteks ini, wartawan harus memiliki pemahaman yang baik tentang peristiwa ketika suatu masalah muncul; 2). *Diagnose causes*, merupakan komponen framing yang digunakan untuk menggambarkan siapa yang dianggap sebagai pihak utama dalam peristiwa, merujuk apa dan siapa; 3). *Make moral judgment* digunakan untuk memberikan pembenaran argumentasi pada definisi masalah yang ada. Ini melibatkan pembenaran

argumen yang berkaitan dengan isu yang dikenal oleh banyak orang; dan 4). *Treatment recommendation*; elemen ini digunakan untuk memberikan pandangan terkait dengan solusi yang diinginkan wartawan. Cara-cara untuk mengatasi masalah akan bervariasi tergantung pada peristiwa yang terjadi dan penyebab dari masalah tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman digunakan dalam penelitian ini guna melihat cara media mengkonstruksi realitas yang ada, peristiwa yang terjadi dipahami melalui bingkai media. Framing menunjukkan teknik bercerita yang digunakan media terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Framing Robert N. Entman menonjolkan pada aspek tertentu dari peristiwa yang ada, mencakup pemilihan seleksi, penyorotan, dan pemberian hubungan fakta dalam berita agar lebih menarik, memiliki nilai khusus, dan mudah dikenang. Cara tersebut akan menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektif yang diinginkan media (Sobur, 2012).

Secara metodologis, peneliti analisis framing sering menggunakan kerangka Entman sebagai “struktur pengkodean berbasis teori” untuk mengidentifikasi elemen framing dalam teks, dengan melibatkan pemeriksaan teks untuk komponen spesifik seperti identifikasi masalah, penyebab, solusi, dan penilaian, serta identitas pemangku kepentingan seperti “korban, penjahat, dan pemecah masalah”. Pendekatan sistematis ini memungkinkan peneliti menggambarkan bagaimana suatu topik dibingkai dan dikonstruksi sebagai isu, serta bagaimana isu-isu ini kemudian menjadi kategori tematik utama yang mengorganisir debat publik (Garnier et al., 2020)

Analisis framing melibatkan pengkodean kualitatif data, dimana peneliti dapat mengkaji ulang artikel kedalam komponen framing yang paling menonjol (Rudge et al., 2021). Beberapa penelitian menggunakan perangkat lunak seperti NVivo untuk membantu proses pengkodean, selain itu dapat menilai korpus dengan menggunakan kerangka Entman yang memecah framing menjadi framing masalah, penyebab, moral, dan solusi (Wardekker, 2021). Pendekatan Entman terhadap analisis framing penting untuk mengeksplorasi bagaimana narasi yang berbeda memengaruhi keyakinan, sikap, dan tindakan audiens (Stalpouskaya & Baden, 2015).

Ketika diterapkan pada kajian komunikasi politik, analisis framing mengungkap dinamika kekuasaan dan pengaruh. Entman menggambarkan framing sebagai proses sentral di mana pejabat pemerintah dan jurnalis saling memengaruhi secara politik dan memengaruhi publik (Chaban & Bain, 2014). Dalam konteks politik, framing sering melibatkan promosi untuk mendefinisikan masalah tertentu, menyediakan analisis penyebab dan evaluasi moral, serta mendorong solusi tertentu (Knüpfer & Hoffmann, 2024). Mengamati framing mana yang mendominasi wacana publik dapat mengungkap fitur struktural, hierarki, dan dinamika kekuasaan yang mendasarinya (Jungherr et al., 2019; Knüpfer & Hoffmann, 2024). Penerapan analisis framing Entman memberikan wawasan penting di berbagai konteks. Misalnya, penelitian tentang pemberitaan media mengenai protes mengungkap “asosiasi negatif dalam pelaporan tentang protes dan dominasi narasumber dalam pemberitaan” (Rosyada et al., 2022).

Subjek dan objek kajian ini adalah artikel berita dan tulisan lain yang berisi hasil dari wawancara. Teks berita adalah berita langsung tentang pembahasan pemerintah untuk melakukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selama kurun waktu 26 Maret 2023- 26 Juni 2023 pada portal berita. Penulis memilih berita dari setiap portal yang dianggap representatif untuk dianalisis. Kriteria yang harus dipenuhi oleh berita yang dipilih oleh penulis adalah sebagai berikut: 1) Berita yang dipilih adalah *straight news* karena isu ini lebih sering dilaporkan dalam bentuk tersebut dan cocok untuk dianalisis dengan analisis framing Robert N. Entman terkait pemberitaan

dalam bentuk teks, 2) Berita yang wajib dipilih mengandung informasi mengenai pembahasan pemerintah terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media memainkan peran penting dalam membentuk perspektif masyarakat terhadap masalah dunia luas. Bagaimana masyarakat melihat suatu peristiwa dapat dipengaruhi oleh *frame* atau kerangka berita yang digunakan dalam berita. Framing adalah proses pemilihan aspek-aspek tertentu dari realitas yang ada dan menonjolkannya dalam sebuah teks berita guna membentuk interpretasi tertentu di benak pembaca (Matthes, 2012). Penelitian fokus pada cara pemberitaan tentang implementasi *e-government* di Indonesia dengan menggunakan metode analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman.

Hasil analisis data melalui empat Lembaga pemerintahan melalui berita yang muncul di portal berita resmi Lembaga tersebut, diantaranya: Kementerian Agama RI, Kominfo, Lemhanas dan Kementerian PUPR. Berikut adalah berita yang dianalisis menggunakan analisis Entman:

Tabel 1. Daftar berita pada portal lembaga pemerintahan

Nama Kementerian dan Lembaga	Judul Berita	Tautan Berita
Kementerian Agama	Regulasi dan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<a href="https://kemenag.go.id/opini/regulasi-dan-integrasi-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-mx34df">https://kemenag.go.id/opini/regulasi-dan-integrasi-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-mx34df</a>
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sistem Pemerintahan Berbasis Digital Siap Beroperasi pada 2023	<a href="https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/sistem-pemerintahan-berbasis-digital-siap-beroperasi-pada-2023">https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/sistem-pemerintahan-berbasis-digital-siap-beroperasi-pada-2023</a>
Lembaga Ketahanan Nasional	Sosialisasi Konsep Kebijakan Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Arahan Strategis Lemhannas RI T.A. 2022	<a href="https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1630-sosialisasi-konsep-kebijakan-umum-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-dan-arahan-strategis-lemhannas-ri-t-a-2022">https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1630-sosialisasi-konsep-kebijakan-umum-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-dan-arahan-strategis-lemhannas-ri-t-a-2022</a>
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian PUPR Permudah Layanan Perizinan Berusaha Melalui OSS Terintegrasi	<a href="https://pu.go.id/berita/wujudkan-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-kementerian-pupr-permudah-layanan-perizinan-berusaha-melalui-oss-terintegrasi">https://pu.go.id/berita/wujudkan-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-kementerian-pupr-permudah-layanan-perizinan-berusaha-melalui-oss-terintegrasi</a>

Berdasarkan analisis framing Model Entman, dianalisis beberapa unsur yaitu *define problems, diagnoses causes, make moral judgment, dan treatment recommendation/suggest recommendation* untuk beberapa berita sebagai berikut ini

#### 3.1. Kementerian Agama Republik Indonesia

Berdasarkan analisis Framing Entman dalam berita “Regulasi dan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” yang dirilis oleh Kementerian Agama RI, pertama terkait *define problem* terlihat pada teks awal konten yang bergambar Penggunaan SPBE yang belum merata di

setiap daerah, ketersediaan infrastruktur yang belum memadai dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.



Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id) (2025)

**Gambar 1.** Berita pada Kementerian Agama Republik Indonesia

Pertama, terdapat definisi masalah terkait ketidakmerataan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di berbagai daerah. Gambar yang disertakan menunjukkan disparitas signifikan dalam adopsi SPBE, menyoroti ketidaksetaraan akses teknologi antarwilayah. Selain itu, analisis menyoroti bahwa infrastruktur yang belum memadai menjadi hambatan serius dalam implementasi SPBE. Keberhasilan penerapan sistem ini sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur yang mendukung, dan ketidaksetaraan ini dapat menghambat upaya menuju pemerintahan berbasis elektronik yang efektif.

*Bisa jadi, dan sangat mungkin, kondisi demikian dilatari oleh belum adanya platform yang disepakati dan dijalankan bersama mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE mestinya mampu menjadi pedoman bersama mengenai budaya layanan digital yang dijalankan. Sayangnya, budaya ini masih terasa jauh dari harapan. Setidaknya hal ini tercermin dalam beberapa indeks capaian.*

Kesadaran masyarakat juga menjadi sorotan dalam analisis ini. Data menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan penggunaan SPBE masih rendah. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam edukasi dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap inisiatif pemerintah berbasis teknologi. Analisis Framing Entman menggambarkan bahwa berita ini menonjolkan permasalahan utama terkait dengan ketidakmerataan penggunaan SPBE, infrastruktur yang belum memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap kerangka framing ini dapat menjadi dasar untuk merancang regulasi dan strategi integrasi yang lebih efektif dalam mendorong pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Penekanan teks pada paragraf pertama menjelaskan bahwa sistem *e-government* diimplementasikan memperhatikan kesiapan pemahaman dan layanan digital yang akan dijalankan oleh instansi-instansi.

*Data peringkat pelaksanaan e-government ini seyogyanya mampu mendorong semua pihak untuk lebih meningkatkan implementasi e-government. Kondisi ini juga mengandaikan tantangan tersendiri agar semua pihak meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelaksanaan e-government dan meningkatkan kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta infrastruktur TIK serta tentu saja regulasi-regulasi yang diperlukan. Lebih jauh dari itu, semua pihak patut memastikan pembangunan e-government sebagai langkah yang tepat, sesuai perkembangan, kebutuhan, dan berbagai faktor terkait.*

Kedua, dalam *diagnoses causes*, tergambar bahwa adanya tantangan pada kesiapan implementasi SPBE disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah kurangnya kesadaran secara menyeluruh tentang urgensi dan pentingnya pelaksanaan *e-government* di semua lapisan masyarakat. Diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap manfaat SPBE agar dapat menciptakan dukungan yang lebih luas. Selain itu, tantangan lainnya adalah hierarki kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Peningkatan kompetensi di sektor TIK menjadi kunci dalam memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat mengadopsi dan mengelola teknologi secara efektif. Sumber daya manusia yang terampil dalam TIK menjadi pondasi penting untuk kesuksesan implementasi SPBE. Infrastruktur TIK yang memadai menjadi faktor penyebab permasalahan. Diharapkan dengan ketersediaan infrastruktur yang handal dan terkoneksi secara baik akan mendukung kelancaran implementasi SPBE. Oleh karena itu, investasi dan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan infrastruktur TIK menjadi fokus untuk mencapai pemerintahan berbasis elektronik yang efisien dan efektif.

Kaidah ketiga, *make moral judgment* pada konten tersebut menunjukkan bahwa peringkat pelaksanaan *e-government* di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain. Hasil evaluasi dari penerapan SPBE di Indonesia menggambarkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap *e-government* sebagai upaya krusial dalam meningkatkan capaian pemerintahan berbasis elektronik terutama dalam mempersiapkan infrastruktur yang memadai. Hal ini mencakup pengembangan tata kelola sistem, proses, dan prosedur kerja, hemat waktu, dan dapat diukur. Pelaksanaan SPBE merupakan komponen kunci dalam mendukung transformasi digital di Indonesia, sehingga perlu dipastikan bahwa teknologi diintegrasikan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan pemerintahan yang lebih modern dan adaptif.

*Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang peringkat EGDI (E-Government Development Index) dirilis tiap tahunnya. Pada tahun 2018, Indonesia mendapat peringkat ke-107 EGDI. Posisi ini cukup "melegakan", karena naik 9 peringkat dibandingkan tahun 2016. Namun demikian, di kawasan ASEAN Indonesia menempati peringkat ke-7 setelah Vietnam, masih sama seperti tahun 2016. Artinya, head to head dengan Vietnam, Indonesia belum mampu menyalip negara tersebut dalam bidang kualitas pelaksanaan e-government pada kurun waktu 3 tahun.*

*Sudah ketinggalan dari Vietnam, peringkat Indonesia ini juga masih berada jauh di bawah negara-negara di ASEAN lainnya seperti Singapura (peringkat ke-7 EDGI), Malaysia (peringkat ke-48 EDGI), Brunei Darussalam (peringkat ke-59 EDGI), Thailand (peringkat ke-73 EDGI), dan Filipina (peringkat ke-75 EDGI). Sementara itu, posisi pertama hingga kelima, berturut-turut diraih oleh Denmark, Australia, Republik Korea, Inggris, dan Swedia. Nilai rata-rata EGDI Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata di regional Asia Tenggara. Indonesia berada pada angka 0,5258 sedangkan rata-rata EGDI di kawasan Asia Tenggara adalah 0,5555.*

Peningkatan kesadaran masyarakat dan investasi strategis dalam infrastruktur serta penerapan SPBE akan menjadi pondasi utama dalam mengatasi keterlambatan peringkat pelaksanaan *e-government* di Indonesia. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut dapat membentuk dasar yang kuat untuk mencapai pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Tahap berikutnya adalah, *treatment recommendation/suggest recommendation* adalah rekomendasi perlakuan atau saran yang diusulkan menyoroti kebutuhan peningkatan infrastruktur

Teknologi Informasi (TI). Selain itu fokus pada pemahaman mendalam terhadap budaya masyarakat. Pemerintah dapat mengarahkan upaya pengimplementasian SPBE pada kesiapan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dalam mengadopsi dan memanfaatkan SPBE, serta untuk mencapai pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan infrastruktur TI merupakan bagian krusial dalam mendukung implementasi SPBE.

Investasi strategis dalam pembaruan infrastruktur TI akan memastikan bahwa teknologi dapat berfungsi optimal dan diakses secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Aspek *social* masyarakat menjadi kunci keberhasilan penerapan SPBE, perlu adanya pendekatan yang mempertimbangkan keberagaman budaya di Indonesia. Pemerintah diharapkan untuk mengambil langkah-langkah edukatif dan mengadaptasi solusi teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai dan cara berpikir masyarakat Indonesia (La Adu et al., 2022). Selain itu, pentingnya pemerataan implementasi SPBE di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat dan aksesibilitas SPBE merata di setiap daerah, sehingga tidak hanya terbatas pada kawasan perkotaan tetapi juga mencakup daerah pedesaan.

Berdasarkan analisis framing terhadap berita yang dirilis oleh Kementerian Agama RI mengenai SPBE, terlihat bahwa pendekatan yang digunakan secara konsisten menyoroti berbagai tantangan struktural, teknologis, dan kultural yang menghambat implementasi pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Berita tersebut membingkai ketimpangan implementasi SPBE sebagai masalah utama. Hal ini tergambar melalui narasi dan visualisasi tentang ketidakmerataan penerapan SPBE antar daerah, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di berbagai wilayah, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan urgensi SPBE. Masalah-masalah ini diposisikan sebagai hambatan awal yang mendasar, mengindikasikan bahwa adopsi SPBE belum menjadi prioritas merata di seluruh tingkatan masyarakat dan pemerintahan (Wijaya dan Saleh, 2025). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, dibutuhkan sinergi antara penguatan infrastruktur, pengembangan kapasitas manusia, serta pendekatan budaya yang sensitif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam.

### **3.2. Kementerian Komunikasi dan Digital**

Berdasarkan analisis Framing Entman terhadap berita "Sistem Pemerintahan Berbasis Digital Siap Beroperasi pada 2023" yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI, terlihat bahwa lembaga pemerintah tersebut menggarisbawahi pentingnya penerapan SPBE sebagai bagian dari transformasi digital Indonesia, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur digital. Framing berita di situs web Komdigi, menyoroti tahap *define problem* dengan fokus pada target penerapan SPBE pada tahun 2023. Penekanan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong kemajuan menuju pemerintahan berbasis digital dalam waktu yang ditentukan.



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital [www.komdigi.go.id](http://www.komdigi.go.id) (2025)

**Gambar 2.** Berita pada Kementerian Komunikasi dan Digital

Kedua, dalam *diagnoses causes*, tergambar bahwa salah satu upaya yang diidentifikasi untuk mencapai target ini adalah melalui pembangunan pusat data cloud yang dikelola oleh negara. Langkah-langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam memperkuat infrastruktur digital sebagai bagian dari strategi transformasi digital yang lebih luas. Dengan menetapkan target waktu tertentu dan mengambil langkah konkret seperti pembangunan pusat data, pemerintah berusaha untuk mempercepat proses implementasi SPBE dan memastikan kesiapan infrastruktur yang diperlukan. Analisis yang dilakukan terhadap berita tersebut menyoroti komitmen pemerintah dalam mencapai target penerapan SPBE pada tahun 2023, dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur digital, seperti pusat data berbasis cloud, sebagai langkah strategis untuk mendorong transformasi digital di Indonesia.

*"Transformasi digital di sektor pemerintah terus berjalan, dan kami targetkan pada 2023 sudah mulai masif," ujar Samuel dalam video conference, Selasa (21/7). Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem interoperabilitas bagi aplikasi-aplikasi pemerintah, baik di tingkat kementerian dan lembaga (K/L) pusat maupun daerah. Kebijakan ini, telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).*

*Penerapan SPBE memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas. Kemudian, mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.*

Tahap ketiga analisis yaitu *make moral judgement*, yang mengacu pada pembuatan penilaian moral, menyoroti bahwa penerapan SPBE memiliki empat tujuan utama. Pertama, adalah menciptakan pengelolaan kinerja pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab yang menekankan pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Kedua, tujuan tersebut meliputi penciptaan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, yang bertujuan untuk mengawasi proses pemerintahan dengan efektif dan adil. Ketiga, SPBE bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, yang menekankan pentingnya memberikan layanan yang adil, cepat, dan berkualitas kepada masyarakat. Keempat, adalah meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi, yang mencerminkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi pemerintahan.

Pada tahap *treatment recommendation*, tergambar bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendorong tercapainya target-target tersebut. Salah satu langkah yang ditandai adalah pembangunan pusat data cloud yang dikelola oleh negara. Hal ini menunjukkan

keseriusan pemerintah dalam memperkuat infrastruktur digital sebagai bagian dari strategi implementasi SPBE. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah aplikasi, termasuk *e-planning*, *e-budgeting*, *eprocurement*, *e-payment*, hingga *e-money*, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemerintahan. Upaya untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi pemerintah ini dengan sistem interoperabilitas juga menjadi langkah penting dalam memastikan koordinasi dan kolaborasi yang efektif antarinstansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan terkait implementasi SPBE juga telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengarahkan transformasi digital dalam administrasi publik (Pemerintah Pusat, 2018). Dengan demikian, analisis komprehensif ini menyoroti upaya konkret pemerintah dalam mewujudkan tujuan SPBE melalui pembangunan infrastruktur, implementasi aplikasi, dan pengaturan kebijakan yang tepat.

Secara keseluruhan, framing dalam berita ini menyampaikan pesan bahwa implementasi SPBE pada 2023 bukan sekadar janji politik, melainkan agenda strategis yang telah dilengkapi dengan infrastruktur, aplikasi pendukung, dan kerangka hukum yang memadai. Dengan menekankan aspek moral, penyebab teknis, serta solusi konkret, narasi yang dibangun oleh Kominfo bertujuan untuk membentuk opini publik positif, menunjukkan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengadopsi digitalisasi. Mendorong legitimasi sosial dan politik terhadap kebijakan digitalisasi birokrasi. Serta, menarik partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung transisi menuju pemerintahan digital yang inklusif dan efisien. Dengan demikian, SPBE diposisikan sebagai titik balik penting menuju tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berbasis data.

### 3.3. Lembaga Ketahanan Nasional

Framing konten dengan model Entman pada berita yang muncul di website Lembaga Ketahanan Nasional, dilihat dari pendefinisian masalah (*define problem*) yang berkaitan dengan adanya perubahan paradigma tata kelola berupa *society*, *industry*, dan *governance*. Dalam upaya untuk meningkatkan modernisasi digital bangsa, SPBE juga membantu dalam konteks modernisasi digital.



Sumber: Lembaga Ketahanan Nasional [www.lemhannas.go.id](http://www.lemhannas.go.id) (2025)

**Gambar 3.** Berita pada Lembaga Ketahanan Nasional RI

Sumber masalah (*diagnosis causes*) ditunjukkan pada konten saat menghadapi transformasi digital nasional. Pemerintah sebelumnya hanya berfokus pada pemerintah itu sendiri tanpa melibatkan masyarakat, sehingga mereka hanya dapat menggunakan layanan yang sudah disediakan.

Agar masyarakat dapat memberikan saran dan tanggapan yang lebih interaktif terhadap program dan kegiatan yang akan dibangun atau sudah ada, diharapkan sistem pemerintahan masa depan akan menjadi lebih transparan, terbuka, dan berkolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membantu orang-orang, tetapi juga bekerja dengan orang-orang untuk mengubah pemerintahan.

*Karena adanya penyederhanaan birokrasi jadi dibutuhkan penyempurnaan road map reformasi birokrasi nasional tahun 2020 sampai 2024, kata staf KemenPAN-RB Desti Nuraini. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah dengan meningkatkan nilai indeks SPBE dan nilai indeks pelayanan publik.*

*Selanjutnya, staf Kementerian PANRB itu menjelaskan SPBE, yang termasuk dalam pemerintahan digital, berperan dalam kerangka kerja ekosistem digital nasional. Adapun demikian, SPBE tidak bisa mencakup seluruh ekosistem digital nasional seperti infrastruktur digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Oleh karena itu, dibutuhkan lingkungan yang saling mendukung dengan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mengakses layanan dan mengejar peluang ekonomi.*

Dari masalah tersebut, pada tahap pembuatan keputusan moral (make moral judgment) menunjukkan bahwa perbaikan peta reformasi birokrasi nasional tahun 2020- 2024 diperlukan untuk menyederhanakan birokrasi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa tata kelola pemerintahan digital yang lebih efisien, efektif, dan responsif akan meningkatkan nilai indeks SPBE dan indeks pelayanan publik. Lanjut ke tahap rekomendasi perawatan, menunjukkan bahwa perubahan digital, hal tersebut tertuang ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Transformasi digital dapat memungkinkan penerapan SPBE yang terintegrasi, pelayanan publik berbasis elektronik yang dapat diakses di mana saja, dalam layanan pemerintahan. Semua pemangku kepentingan harus mendukung pembangunan ekosistem digital nasional. Untuk menerapkan pemerintahan digital, sangat penting untuk bekerja sama dengan Satgas P2DD, Dewan Pengarah SDI, dan Tim Koordinasi SPBE Nasional. Secara keseluruhan, Framing berita oleh Lemhannas membentuk narasi bahwa transformasi digital melalui SPBE bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari pergeseran paradigma nasional dalam tata kelola pemerintahan dan hubungan negara-rakyat. Hal ini menandakan sebuah narasi strategis yang menegaskan bahwa permasalahan tata kelola lama yang eksklusif harus digantikan dengan sistem kolaboratif. Perubahan ini menuntut partisipasi masyarakat adalah syarat utama tata kelola digital yang demokratis. SPBE bukan hanya alat teknis, tetapi simbol reformasi moral birokrasi. Serta transformasi digital nasional perlu dipayungi oleh kebijakan makro yang holistik dan aktor lintas sektor. Dengan demikian, SPBE diframing sebagai simbol era baru pemerintahan Indonesia yang digital, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berdaya guna.

Framing SPBE oleh Lemhannas menunjukkan bahwa transformasi digital diposisikan tidak hanya sebagai inisiatif teknologi, tetapi sebagai proyek ideologis dan moral negara. SPBE diframing sebagai simbol perubahan tata kelola menuju sistem yang lebih demokratis, inklusif, dan kolaboratif. Dengan demikian, komunikasi kebijakan yang dibangun melalui framing institusional memainkan peran strategis dalam mengarahkan persepsi publik dan legitimasi agenda digital pemerintah.

### **3.4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Dalam analisis framing terhadap berita yang muncul di Kementerian PUPR menggunakan model Entman, kita dapat mengidentifikasi beberapa tahapan kunci yang memberikan wawasan mendalam tentang penyajian dan penekanan informasi. Pada tahap *define problem*, berita tersebut menyoroti pencapaian Kementerian PUPR yang mendapatkan predikat BAIK dalam Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 dengan skor 3.17. Ini menunjukkan

pengakuan terhadap efektivitas dan kemajuan Kementerian dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id) (2025)

**Gambar 4.** Berita pada Kementerian Pekerjaan Umum RI

Tahap *diagnoses causes* mengungkapkan bahwa upaya koordinasi dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan tujuh Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya untuk menyederhanakan tahapan bisnis dan birokrasi. Tujuan koordinasi adalah untuk menerapkan Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi dan meningkatkan persepsi investor dan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan usaha dalam mencegah dan memberantas korupsi dengan lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi operasional pemerintahan.

*“Koordinasi ini dilakukan dalam rangka implementasi SPBE pada tujuh K/L untuk penyederhanaan proses bisnis dan birokrasi, meningkatkan persepsi positif masyarakat dan investor, dan menerapkan Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi. Tujuannya antara lain untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan lebih efektif dan efisien”, kata Odo R. M.Manuhutu.*

Pada tahap *make moral judgement*, Kementerian PUPR menerapkan aplikasi *Government to Business* (G2B) pada sistem *Online Single Submission* (OSS) di BKPM dan *Government to Citizen* (G2C) pada Indonesia Satu di bawah Kementerian Kominfo dan KemenPANRB. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk mempermudah pelayanan dan proses bisnis, serta memastikan bahwa sistem pemerintahan dapat diakses secara lebih mudah oleh berbagai pemangku kepentingan.

*“Ke depan, Kementerian PUPR terus berkomitmen meningkatkan pemanfaatan SPBE dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan target tahun 2024 mendapat predikat Sangat Baik (4.00)”, kata Zainal Fatah.*

Tahap *treatment recommendation* menyoroti bahwa Kementerian PUPR melakukan integrasi sistem informasi dengan OSS dalam hal izin berusaha sebagai bagian dari Transformasi Layanan Digital. Langkah ini dilakukan guna mendorong implementasi SPBE, dengan tujuan meningkatkan

efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan, serta mendorong penggunaan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Analisis framing oleh Kementerian PUPR menegaskan bahwa SPBE tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam reformasi birokrasi dan tata kelola yang berkelanjutan. Narasi keberhasilan yang ditopang oleh indikator kinerja, dikombinasikan dengan legitimasi moral dan kolaborasi lintas sektor, menciptakan wacana transformasi digital yang holistik. Framing ini juga memperlihatkan bahwa reformasi berbasis digital tidak terlepas dari kebutuhan penguatan infrastruktur, literasi digital, dan partisipasi aktif dari masyarakat serta pelaku usaha.

Dari analisis framing yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia oleh Kementerian PUPR membutuhkan penguatan infrastruktur, peningkatan literasi digital, dan budaya partisipatif masyarakat, serta integrasi sistem di seluruh lembaga pemerintahan. Hal ini akan mendukung transformasi digital yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

#### **4. PENUTUP**

Analisis Framing Robert Entman mempunyai empat pisau analisis untuk memecahkan masalah antara lain pendefinisian masalah, interpretasi/membangkitkan penyebab masalah, membuat keputusan moral, dan menekankan penyelesaian. Model framing ini melihat pemilihan tempat, pengulangan grafis, label, asosiasi simbol dan budaya, generalisasi, simplikasi, dan lain-lain. Dari analisis framing yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa SPBE dibingkai sebagai solusi strategis dalam menghadapi tantangan modernisasi tata kelola pemerintahan. Penerapan SPBE di Indonesia membutuhkan upaya untuk meningkatkan beberapa sektor diantaranya infrastruktur yang merata di seluruh wilayah, budaya masyarakat, literasi teknologi dan digital masyarakat, dan penerapan sistem SPBE untuk semua lembaga dan kementerian pusat ataupun daerah. Framing media dan narasi kelembagaan memegang peran penting dalam mempengaruhi persepsi publik dan arah kebijakan pemerintah terkait transformasi digital pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan kajian dan pemahaman mendalam terhadap struktur framing dalam merancang strategi komunikasi kebijakan publik yang efektif. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengkaji dimensi ideologis dan politis yang mungkin tersembunyi dalam wacana kebijakan SPBE di media pemerintah. Serta partisipasi dan keterlibatan masyarakat melalui *cultural framing* dan kesiapan sosial dalam transformasi digital.

#### **Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, terutama kepada Lembaga Penelitian, Inovasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia (LPIPM UAI), Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A., Sensuse, D. I., Latif, L. A., & Yunus Abbas, M. (2021). Study on E-Government Integration: A Theoretical and Empirical Review. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1125(1), 012028. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1125/1/012028>
- Aryanti, K. A. F., Sukarsa, I. M., & Susila, A. A. N. H. (2021). The Study of E-Government Implementation in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Merpati (Menara Penelitian Akademika Teknologi Informasi)*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24843/jim.2022.v10.i01.p01>
- Chaban, N., & Bain, J. (2014). Framing the EU in a Time of Crisis: Media Reflections from EU Strategic Partners in Asia-Pacific. *Communicating Europe in Times of Crisis*, 118–142. [https://doi.org/10.1057/9781137331175\\_6](https://doi.org/10.1057/9781137331175_6)
- Danu, D. E. A., Supardi, S., Sutanto, S. T. J. P., & Riko, R. S. (2023). E-Services: Implementation of Digital-Based Public Services in The 4.0 Era. *Athena: Journal of Social, Culture and Society*, 1(3), 87–92. <https://doi.org/10.58905/athena.v1i3.40>
- Daud, I. I., Sumaryana, A., Nurasa, H., & Susanti, E. (2022). Electronic Digital Identification (E-KTP) as an Element of E-Democracy in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2022(1), 776–783. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10593>
- Entman, R. M. (2007). Framing Bias: Media in the Distribution of Power. *Journal of Communication*, 57(1), 163–173. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x>
- Farhan, R., & Sunuantari, M. (2023). Digital Village Television As Government Public Relations Media To Disseminate Information. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(3), 423–439. <https://doi.org/10.33822/jep.v6i3.5726>
- Garnier, M., Tamás, P., van Wessel, M., & van Bommel, S. (2020). Something wicked this way comes: How well did UK newspapers support the public debate of Avian Influenza as a wicked problem? *Journalism*.
- Hanafi, R., Munir, M., Suwatno, S., & Furqon, C. (2023). Identification of IT Governance and Management Objectives and Target Process Capability Level in Government Institution. *INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, 7(2), 290–308. <https://doi.org/10.29407/intensif.v7i2.20108>
- Johansson, K. M., & Raunio, T. (2020). Centralizing Government Communication? Evidence from Finland and Sweden. *Politics and Policy*, 48(6), 1138–1160. <https://doi.org/10.1111/polp.12370>
- Jungherr, A., Posegga, O., & An, J. (2019). Discursive Power in Contemporary Media Systems: A Comparative Framework. *The International Journal of Press/Politics*.
- Kartini, K., Hasibuan, R. M. B., Sinaga, N. S., & Rahmadina, A. (2022). Metode Analisis Framing dalam Media Sosial. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 3(2), 141–145. <https://ummaspul-e-journal.id/JENFOL/article/view/4471>
- Knüpfner, C., & Hoffmann, M. (2024). Countering the “Climate Cult” – Framing Cascades in Far-Right Digital Networks. *Political Communication*.
- La Adu, arifin, Hartanto, R., & Fauziati, S. (2022). HAMBATAN-HAMBATAN DALAM IMPLEMETASI LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA PEMERINTAH DAERAH. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 5(3), 215–223. <https://doi.org/10.33387/jiko.v5i3.5344>
- Luo, L., & Hu, K. (2021). Research on the Shaping Path of Government Image From the Government New Media. *Proceedings of the 6th International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2020)*, 165(Eml 2020), 350–353. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210210.057>
- Matani, M., & Hassanpour, M. (2014). The effects of media on the level of accountability of public organization. *Management Science Letters*, 4(9), 2133–2138. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2014.8.004>
- Matthes, J. (2012). Framing Politics. *American Behavioral Scientist*, 56(3), 247–259. <https://doi.org/10.1177/0002764211426324>
- Muhammad Amal Atta, & Muhammad Maaz Shakeel. (2023). Crafting Public Narratives: A Holistic Overview of Directorate General Public Relations Punjab. *Society, Law and Policy Review*, 2(1), 54–73. <https://doi.org/10.62585/slpr.v2i1.35>
- Nurhidayat, N., Nurmandi, A., & Congge, U. (2024). Bridging the digital divide: analyzing public participation in Indonesia’s e-government through the e-participation index. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 481–498. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i2.14435>
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55–75. <https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962963>

- Pemerintah Pusat. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.
- Rindani, F., & Puspitodjati, S. (2020). Integrasi Metode Webqual untuk Analisis Importance Performance dan Model Kano untuk Menganalisis Kualitas Sistem E-Government: Studi Kasus LAPOR! *Jurnal Sistem Informasi*, 16(2), 1–17. [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id),
- Rudge, A., Foley, K., Lunnay, B., Miller, E., Batchelor, S., & Ward, P. (2021). How Are the Links between Alcohol Consumption and Breast Cancer Portrayed in Australian Newspapers?: A Paired Thematic and Framing Media Analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.
- Sabani, A. (2018). *Association for Information Systems AIS Electronic Library ( AISeL ) A Conceptual Framework for the Adoption of E-Government in Indonesia A Conceptual Framework for the Adoption of E- Government in Indonesia*.
- Sergey, D., & Logunova, O. (2016). The Representation of the Federal Elections of 2011 and 2012 in Russia by the Major National Television Channels. *Communications. Media. Design*, 1(1), 76–84. <https://doi.org/10.17323/2542-1395-2016-1-1-76-84>
- Singh, S. (2020). The media and journalism challenges in Melanesia. *Pacific Journalism Review : Te Koakoa*, 26(1), 48–62. <https://doi.org/10.24135/pjr.v26i1.1095>
- Sobari, W., Pohan, I. A., & Priandani, N. D. (2023). Analysis of Industry 4.0 Readiness among Regional Governments in Indonesia: The Worth of Digital Wisdom and Values in Public Services. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(2), 117–130. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i2.1214>
- Sobur, A. (2012). *Analisis Teks Media : Suatu pengantar untuk Analisis wacana, analisis Semiotik, dan Analisis Framing*.
- Stalpouskaya, K., & Baden, C. (2015). To Do or Not to Do: the Role of Agendas for Action in Analyzing News Coverage of Violent Conflict. *Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*.
- Susanto, S. N. H., Wibawa, K. C. S., Suparno, & Indarja. (2024). *The Implementation of E-Government Policies in Innovation of Public Service Provision in Indonesia*. 22, 15416–15424.
- Ummah, A., Maryam, S., & Wahidin, D. T. S. (2022). E-Government Implementation to Support Digital Village in Indonesia: Evidence from Cianjur Village, Bogor Regency. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 245–259. <https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.14038>
- Wadipalapa, R. P., Katharina, R., Nainggolan, P. P., Aminah, S., Apriani, T., Ma`rifah, D., & Anisah, A. L. (2024). An Ambitious Artificial Intelligence Policy in a Decentralised Governance System: Evidence From Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 43(1), 65–93. <https://doi.org/10.1177/18681034231226393>
- Wahyudin, W. (2023). Implementasi E-Office Dalam Peningkatan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(06), 557–567. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i06.321>
- Wan, S. (2022). Research on the Role of New Media in Thailand’s Democratic Politics. *The Frontiers of Society, Science and Technology*, 4(8), 5–10. <https://doi.org/10.25236/fsst.2022.040802>
- Wardekker, A. (2021). Contrasting the framing of urban climate resilience. *Sustainable Cities and Society*.
- Yüksel, Y. (2013). An analysis of the media and government relationship. *Selçuk İleiişim*, 8(1), 57–70.